



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 28 Februari 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.45 WIB s.d 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; 2. Rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2011; 3. Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN 2011
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah untuk membahas mengenai potret dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2010; rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2011; dan evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN 2011 sebagai lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat tanggal 16 Februari 2011 yang lalu.
3. Ketua mempersilakan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Agar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum melengkapi kekurangan data yang disampaikan pada RDP hari ini dan menyampaikan kekurangan data tersebut ke Komisi V DPR RI, yaitu :
 - a. Kegiatan/Pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak berfungsi sesuai tujuan dan perencanaannya.

- b. Kegiatan/Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Potret dan Evaluasi seluruh penyedia jasa secara lengkap dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pelaksanaan APBN TA 2010.
2. Untuk kegiatan/pekerjaan APBN TA 2011, Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian PU agar menginstruksikan seluruh Satker/PPK pada akhir tahun anggaran untuk menyampaikan secara lengkap potret dan evaluasi seluruh penyedia jasa pelaksana program/kegiatan, dan selanjutnya Ditjen SDA menyampaikan hal tersebut ke Komisi V DPR RI.
 3. Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen SDA Kementerian PU untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap penyusunan pagu dan *Owner Estimate (OE)* mengingat banyak sekali penyedia jasa yang melakukan penawaran antara 50% sampai dengan 70% dari OE tetapi status kinerja masih baik.
 4. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen SDA Kementerian PU untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencapai Azas Kemanfaatan dan meminta Ditjen SDA Kementerian PU untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap Kepala Balai dan Kepala Satker/PPK di lingkungan Ditjen SDA Kementerian PU mengenai kinerja pelaksanaan APBN dikaitkan dengan Azas Fungsi Prasarana.
 5. Komisi V DPR RI mendorong Ditjen SDA Kementerian PU untuk melakukan evaluasi terhadap rangkap jabatan Kepala Satker dan PPK agar terdapat kejelasan pembagian tugas dan wewenang.
 6. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian PU untuk melanjutkan dan menyempurnakan audit teknis dan kemanfaatan atas kegiatan/pekerjaan yang telah selesai di TA 2010 dan tahun sebelumnya yang dibayai melalui APBN dan selanjutnya menyusun Rencana Tindak Lanjut Jangka Pendek, Menengah dan Panjang sesuai Skala Prioritas.
 7. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian PU untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang menjadi amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
 8. Komisi V DPR RI akan mengagendakan Kunjungan Spesifik dalam rangka fungsi Pengawasan DPR RI terkait program/kegiatan Ditjen SDA Kementerian PU yang telah selesai namun belum berfungsi secara optimal agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 9. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen SDA Kementerian PU menyediakan seluruh peta daerah irigasi, dimulai dari yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan melakukan revisi terhadap Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

**DIRJEN SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

ttd

Dr. Ir. MOCHAMMAD AMRON, MSc

Jakarta, 28 Februari 2011

KETUA RAPAT,

ttd

Ir. H. MULYADI

DIRUT PT. PELINDO I,

DIRUT PT. PELINDO III,

DIRUT PT. PELINDO IV,

HARRY SUTANTO

DJARWO SURJANTO

ALFRED NATSIR

PLH. DIRUT PT. ASDP
INDONESIA FERRY,

DIREKTUR KOMERSIAL DAN
PENGEMBANGAN USAHA PT. PELINDO II,

SIRAJUDDIN SAINI

SAPTONO R. IRIANTO

Jakarta, 31 Januari 2011,
KETUA RAPAT,

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 21 September 2010

KETUA RAPAT,

IR. H. MULYADI

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT**

K E T U A,

IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE

SOEHARSO MONOARFA, MA

.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC

MARSDYA. WARDJOKO

SOENARSO

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

